

LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



BALAI VETERINER BANJARBARU
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan Pelaksanaan FKP	2
I.3. Ruang Lingkup	2
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	4
II.1. Sumber Input dan Tema FKP	4
II.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
II.3. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	8
III.1. Identifikasi Masalah	8
III.2. Analisis	8
III.3. Rencana Aksi	9
BAB IV. PENUTUP	10
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	11
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	15
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	16
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	18

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan di Balai Veteriner Banjarbaru.

I.2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP bertujuan untuk:

- a. Membangun pelayanan publik yang menghormati hak dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses layanan secara setara dan tanpa diskriminasi.
- b. Mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik (SPP), termasuk tarif layanan dan janji layanan pengujian, agar transparan dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.
- c. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, dalam memberikan masukan demi penyempurnaan dan pengembangan pelayanan yang responsif dan inklusif.
- d. Membangun kesepakatan bersama antara penyelenggara layanan dan masyarakat agar terjadi komitmen bersama dalam melaksanakan layanan publik yang berkualitas dan ramah bagi semua golongan.
- e. Mensosialisasikan aplikasi LAPORMAS! sebagai media pengaduan dan pelaporan pelayanan publik untuk penanganan pengaduan yang cepat, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

I.3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik di Kementerian Pertanian meliputi penyusunan Standar Pelayanan Publik yang inklusif untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas, sosialisasi tarif layanan dan janji layanan pengujian, serta evaluasi penerapan kebijakan pelayanan publik. Forum ini juga menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan keluhan. Selain itu, disusun kesepakatan bersama antara penyelenggara layanan dan publik guna komitmen bersama dalam peningkatan mutu serta aksesibilitas layanan yang transparan dan ramah bagi semua golongan. Dalam rangka mendukung layanan publik yang efektif, forum ini juga mencakup peluncuran aplikasi LAPORMAS! sebagai media pelaporan dan pengaduan yang memudahkan masyarakat, termasuk peternak, dalam melaporkan masalah pelayanan dan penyakit hewan secara cepat dan akuntabel. Peluncuran aplikasi

ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat respon atas pengaduan yang masuk sehingga kualitas layanan publik semakin meningkat.

BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP

II.1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Balai Veteriner Banjarbaru memfokuskan pada pembahasan mengenai penyusunan Standar Pelayanan Publik yang inklusif untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas, sosialisasi tarif layanan dan janji layanan pengujian, serta evaluasi penerapan kebijakan pelayanan publik. Forum ini juga menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan keluhan. Selain itu, disusun kesepakatan bersama antara penyelenggara layanan dan publik guna komitmen bersama dalam peningkatan mutu serta aksesibilitas layanan yang transparan dan ramah bagi semua golongan. Dalam rangka mendukung layanan publik yang efektif, forum ini juga mencakup peluncuran aplikasi LAPORMAS! sebagai media pelaporan dan pengaduan yang memudahkan masyarakat, termasuk peternak, dalam melaporkan masalah pelayanan dan penyakit hewan secara cepat dan akuntabel. Adapun sumber data atau informasi yang dimaksud, antara lain: 1. Hasil SKM; 2. Hasil pengelolaan pengaduan; dan 3. Monev pelayanan publik.

II.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Senin

Tanggal : 15 September 2025

b. Tempat Pelaksanaan: Aula Balai Veteriner Banjarbaru

II.3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Balai Veteriner Banjarbaru bersama Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

b. Peserta FKP

Undangan secara offline :

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
10. Kepala BPTU HPT Pelaihari
11. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang
12. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
13. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
14. Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru
15. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan
16. Kepala SMKN PP Pelaihari
17. PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Banjarmasin I
18. PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Banjarmasin II
19. PT. Baksya Jaya Abadi Farm
20. PT. Charoen Pokphand RPHU Banjarbaru
21. PT. Charoen Pokphand Unit Banjarbaru
22. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Poultry Division Tambang Ulang
23. PT. Japfa Comfeed, Tbk Poultry Breeding Division Tambang Ulang 2
24. PT. Malindo Feedmill. Tbk (Banjarmasin Hatchery)
25. PT. Malindo Feedmill. Tbk (Banjarmasin Farm 1)
26. PT. Patriot Intan Abadi
27. PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Ambawang
28. PT. Ciomas Adisatwa Komet
29. PT. Ciomas Adisatwa Tanah Laut
30. PT. Malindo Feedmill. Tbk (Unit Banjarmasin Farm 2)
31. PT. Buana Karya Bakti
32. CV. Akio Progresif Connection
33. CV. Khalisa Vaya Utama
34. CV. Zein Al Fatih
35. CV. Awan Air Jaya
36. CV. Mapan Tujuh Dua Dua Farm
37. CV. Porodisa Makmur Sejahtera
38. CV. Reza
39. Klinik Hewan Purnama
40. A. Anwar Efendi
41. Budiyanto
42. Dr. Meilla Dwi Andrestian
43. Edwin Affandi
44. Haji Priyantoro
45. Hanifah
46. Muhammad Yunus
47. Muhlis

Undangan secara online

1. Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar
2. Kepala Balai Besar Veteriner Maros
3. Kepala Balai Besar Veteriner Wates
4. Kepala Balai Veteriner Medan
5. Kepala Balai Veteriner Lampung
6. Kepala Balai Veteriner Subang
7. Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
8. Kepala Balai Veteriner Jayapura
9. Kepala BBPTU dan HPT Baturraden
10. Kepala BPTU dan HPT Indrapuri
11. Kepala BPTU dan HPT Siborongborong
12. Kepala BPTU dan HPT Padang Mangatas
13. Kepala BPTU dan HPT Pelaihari
14. Kepala BPTU dan HPT Sembawa
15. Kepala BPTU dan HPT Denpasar
16. Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma
17. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
18. Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
19. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
20. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan
21. Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang
22. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang
23. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
24. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat
26. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara
28. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan
29. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
30. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu
31. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kotabaru
32. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya
33. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur
34. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat
35. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan
36. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
37. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
38. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur
39. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara
40. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
41. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya
42. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau
43. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas
44. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara
45. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
46. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
47. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara

48. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser
49. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara
50. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat
51. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau
52. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang
53. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
54. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu
55. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
56. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya
57. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
58. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang
59. Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas
60. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang
61. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak
62. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau
63. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau
64. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
65. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Melawi
66. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
67. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang
68. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara
69. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
70. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan
71. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan
72. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau
73. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung
74. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kalimantan Tengah
75. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner Samarinda
76. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kalimantan Barat
77. Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Kalimantan Utara
78. Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Timur
79. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat
80. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Tengah
81. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara
82. PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Sampit
83. PT. CPI RPHU Palangkaraya
84. PT. Malindo Feedmill. Tbk (Pontianak Hatchery)
85. PT. Mitra Sinar Jaya RPHU Kalimantan Timur
86. PT. Sulung Ranch

II.4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara *Hybrid* yaitu secara tatap muka dan online.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

III.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan, permasalahan utama terkait pelayanan pengujian ternak sapi pada masa *high season* adalah keterbatasan *slot* pengujian bagi pelaku usaha sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) apakah merupakan subsidi pemerintah atau tidak. Jika PNBP bukan subsidi pemerintah, maka timbul wacana untuk menetapkan batasan slot pengujian bagi beberapa pelaku usaha selama *high season* guna mengatur pemerataan layanan. Selain itu, terdapat usulan untuk mengaktifkan kembali notifikasi dari sistem IVLAB 5 kepada pelanggan sebagai sarana pemberitahuan informasi pengujian, sehingga pelayanan menjadi lebih terkoordinasi dan pelanggan mendapatkan kepastian jadwal pengujian. Permasalahan ini membutuhkan solusi yang seimbang antara pengelolaan sumber daya pengujian dan kepentingan pelaku usaha agar pelayanan tetap berjalan efisien dan adil.

III.2. Analisis

Masalah keterbatasan slot pengujian ternak sapi pada masa *high season* terjadi karena kemampuan uji laboratorium per harinya telah ditetapkan berdasarkan standar ISO yang mengatur kapasitas maksimal pengujian dalam satu hari. Jika jumlah sampel yang diajukan melebihi kapasitas tersebut, sampel-sampel kelebihan akan diproses pada hari berikutnya, bukan berarti tidak diuji sama sekali. Penerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai regulasi bertujuan untuk menyamaratakan tarif pengujian di seluruh instansi, bukan sebagai bentuk subsidi pemerintah. Hal ini menjadikan pengelolaan slot pengujian harus diatur dengan efisien agar kapasitas tetap optimal tanpa menimbulkan ketimpangan pelayanan. Selain itu, notifikasi pada sistem IVLAB 5 sempat dihilangkan karena keterbatasan anggaran dari pusat, yang menyebabkan kurangnya komunikasi langsung kepada pelanggan sehingga mempengaruhi kepastian jadwal pengujian. Oleh karena itu, persoalan ini bersifat teknis dan anggaran yang membutuhkan pengelolaan yang lebih optimal dan

koordinasi yang baik antar pihak terkait untuk mempertahankan pelayanan yang lancar dan adil.

III.3. Rencana Aksi

Rencana aksi yang disusun meliputi beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan pengujian ternak sapi. Pertama, melaksanakan simulasi perhitungan kecepatan uji laboratorium sesuai janji layanan dengan kapasitas 100 sampel per hari, serta memastikan sisa sampel akan dijadwalkan ulang keesokan harinya agar proses pengujian tetap berjalan efisien dan sesuai standar ISO. Kedua, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2023, menegaskan bahwa PNBP yang diterapkan merupakan bentuk subsidi pemerintah sehingga tarif pengujian dapat disamaratakan dan dikelola secara transparan sesuai regulasi. Ketiga, mengupayakan kembali pengadaan anggaran dari pusat untuk mengaktifkan notifikasi pada sistem IVLAB 5 yang akan meningkatkan koordinasi dan kepastian jadwal kepada pelanggan. Keempat, memperkuat koordinasi internal dan antar instansi terkait untuk memastikan manajemen slot pengujian berjalan optimal, terutama saat high season, tanpa mengorbankan mutu pelayanan. Kelima, menyusun laporan evaluasi berkala untuk memantau pelaksanaan kapasitas uji, pengelolaan PNBP, dan efektivitas sistem notifikasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan demi pelayanan publik yang maksimal dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha.

BAB IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Standar Pelayanan Publik Balai Veteriner Banjarbaru berkomitmen untuk:

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat membantu Balai Veteriner Banjarbaru dalam menciptakan pelayanan publik yang baik.

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN BALAI VETERINER BANJARBARU

Pada hari ini, Senin, 15 September 2025 telah dilaksanakan kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik secara luring dan daring. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan pengujian ternak sapi pada masa <i>high season</i> adalah keterbatasan <i>slot</i> pengujian bagi pelaku usaha sehingga hasil uji terlambat didapatkan. <i>Simulasi untuk menghitung kecepatan uji sesuai dengan janji layanan (100 sampel dalam sekali masuk di hari tersebut). Sisa sampel yang lain akan dimasukkan besok hari nya.</i>	1 bulan
2	Tarif Pengujian	Kesesuaian tarif yang sudah ditetapkan melalui PNBP dan perihal subsidi pemerintah. PNBP <i>sesuai dengan aturan Permenkeu No.85 Tahun 2023 dan sudah subsidi pemerintah.</i>	Sudah ditetapkan
3	Kemudahan akses pelayanan	Pengadaan kembali notifikasi untuk pelanggan di IVLAB 5. Terkait hal ini, anggaran bergantung dari pusat untuk pengaktifan kembali notifikasi IVLAB 5.	6 bulan
4	Pengaduan Masyarakat	Membuka peluang seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan melalui berbagai kanal pengaduan.	1 bulan
5	Produk Pelayanan	Integrasi <i>aplikasi Lapormas dengan iSIKHNAS. Aplikasi Lapormas hanya menjadi</i>	1 bulan



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

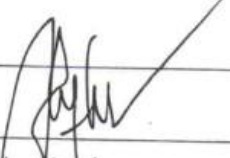
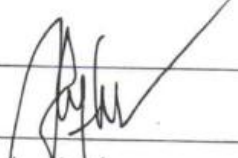
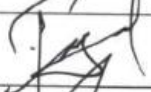
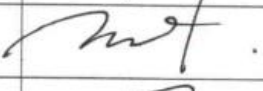
Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

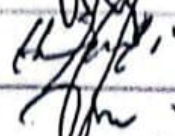
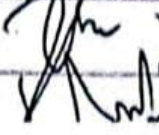
	(Aplikasi)	<i>supporting app</i> bagi iSIKHNAS sebagai <i>feeder</i> laporan masyarakat ke aplikasi iSIKHNAS. Notifikasi akan diterima oleh dinas terkait tempat dimana laporan masyarakat dilaporkan. Tindak lanjut berupa surveilans dan investigasi dilaksanakan oleh petugas BV Banjarbaru.	
--	------------	--	--

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian / perubahan Standar Pelayanan dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 15 September 2025

No.	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1	M. Triasmoro	Dinas Pertanian Kab. Tapin	
2	Doni Wahyu H, M.P	BRMP Rawa	
3	Ir. Muhammad Yunus, SH	Wiraswasta	
4	Heny Dyah I, S.Pt	Dinas Perkebunan dan Pternakan Kab. Barito Kuala	 
5	Drh. Khairus Saleh	DKPP Kab. Kotabaru	
6	Drh. Mufah Prima	Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan	
7	Drh. Edi Santosa	Dinas Perkebunan dan Pternakan Provinsi Kalimantan Selatan	
8	Anwar Syadat G	PT. Japfa Comfeed Indonesia	
9	A Faisal	PT. Malindo Feedmill, Tbk	
10	Andri F Samosir	Unit Polsatwa Dit Samapta	
11	Drh. Muhammad Taufik	Disnak Keswan Kab. Tanah Laut	
12	Drh. Widhi Yanungrah	BPTU HPT Pelaihari	
13	Supiyan	PT. Patriot Intan Abadi	
14	Kamarudin	PT. Charoen Pokphand	

15	Drh. ~~Idi~~ Prastya Idihastuti	DKP3 Kota Banjarmasin	
16	Paglyanto	BRMP Kalimantan Selatan	
17	Budiyanto	Perorangan	
18	Hj. Priyantoro	Perorangan	
19	Eko Agus	CV. Khalisa Vaya Utama	

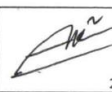
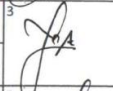
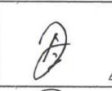
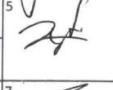
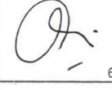
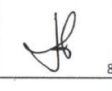
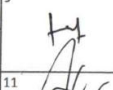
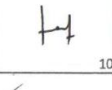
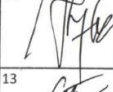
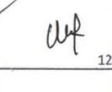
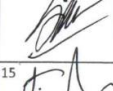
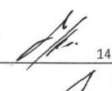
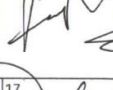
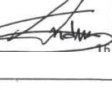
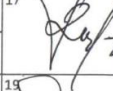
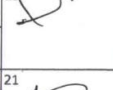
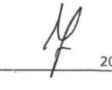
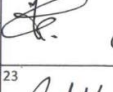
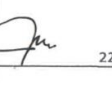
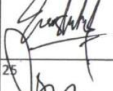
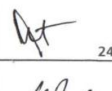
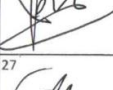
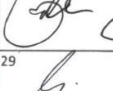
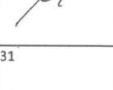
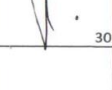
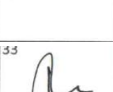
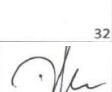
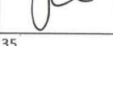
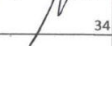
*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta Kegiatan



LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK

HARI : SENIN
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2025

No	Nama	Instansi	Nomor Handphone	Tanda Tangan	
1	M. Triasmoro	Dinas Pertanian Tapan	085260798805		
2	M. Erwin, S.Pt	Dinas Pertanian Tapan	082252113288		
3	Jeni Aryani, SH, MH	Ombudsman RI Kalsel	081348536136		
4	Doni Wahyu H, M.P.	BRMP Rawe	085330003111		
5	Rizkahana Yuliansari	Ombudsman Kalsel	081256026515		
6	Ani Susilawati, M.Sc	BRMP Rawe	081349904884		
7	Dr. Muhammad Yunes, SH	Wira Garuda	081349354818		
8	Moch Anif A	BRMP Rawe	081301304996		
9	Heng Bach I. Igi	Disbunhel Babel			
10	Lh Heng Is	-	0851-9190-1938		
11	dah. Khairus Saleh	DKPP Kotabaru	081257310529		
12	dah. Mupah Prima	Distrik HSS	081253949590		
13	dah. Eli Santosa	Distrik Prok Faldel	081256560201		
14	Amzar Staloh A	PT. Japfa Comfeed Indonesia	0811503066		
15	A. Faisal	PT. Malindo Feedmill Tbk	081252464695		
16	ANDRY. P. SANGAPUR, SH	UNIT POLSATWA DIT SAMAPTA	082250604420		
17	dah. Muhammad Taufik	Distrik Keswan Tanah Laut	08115191523		
18	dah. Widha Yungil	ORH-HPT PCH	085239710913		
19	Supriyan	PT. Patriot Intan Abadi	081357859788		
20	M. Taufiq Rival	PT. Japfa Comfeed Indonesia	085182708926		
21	Kamardin	PT. Charoen Pokphong	08135719788		
22	Supanto	PT. CPJF	085344556529		
23	dah. Prastha Idhastuti	DKP3 Bm	081351970523		
24	Pagiyant	BRMP Kalsel	085251510088		
25	Figi H'luwaa	BRMP Kalsel	085740649778		
26	Pagiyant	Kracng	087815347806		
27	M. Gerys Malm	//	//		
28	Fauzan Reza	PT. Tomas Adicatura	082252808201		
29	Garat Ahmadi	Distrik Barola	081250565118		
30	tau Ag	CV. K V U	08524514051		
31					
32					
33	ALFA DIANOR	Bg DIT SAMAPTA POLDA	085246932035		
34	Hari PURNANTARO	-	085240663050		

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 08009/HM.130/F5.E/09/2025 08 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025

Kepada Yth.
Mohon lihat lampiran
Di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas layanan Balai Veteriner Banjarbaru, kami bermaksud melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk pengguna jasa, stakeholder dan instansi terkait lainnya, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu berkenan hadir dalam acara yang akan dilakukan secara hybrid (offline dan online) pada :

Hari/tanggal : Senin, 15 September 2025
Waktu : 09.00 WITA – Selesai
Tempat : Aula Pertemuan Balai Veteriner Banjarbaru
Acara : Terlampir
Zoom meeting ID : 979 8171 6506
Password : BVbjb

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Bapak/Ibu dapat hadir mengikuti kegiatan yang dimaksud. Konfirmasi kehadiran paling lambat hari Jumat, tanggal 12 September 2025 dengan mengisi Form Konfirmasi Kehadiran pada Link Google form berikut: <https://bit.ly/FKPBVBjb> .Narahubung kegiatan tersebut drh. Ira Nurmala Hani (081325493423).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Veteriner Banjarbaru



drh. Sodorun, M.P
NIP 197009081999031002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta
2. Direktur Kesehatan Hewan di Jakarta
3. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner di Jakarta
4. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran II : Undangan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025
 Nomor : 08009/HM.130/F5.E/09/2025
 Tanggal : 08 September 2025

Agenda (Tentatif)
 FGD Standar Pelayanan Publik Dan Forum Konsultasi Publik
 Tahun 2025

Waktu	Uraian Acara	Pengisi Acara	Keterangan
09.00 – 09.30 (WITA)	Registrasi Peserta	Panitia	MC
	Pembukaan :	Panitia	
	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Sambutan dari Kepala Balai Veteriner Banjarbaru	Kepala Balai Veteriner Banjarbaru	
09.30 – 10.30 (WITA)	Materi Standar Pelayanan Publik (update)	Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan	Moderator
10.30 – 11.00 (WITA)	Standar Pelayanan Publik Balai Veteriner Banjarbaru dan Hasil Survei IKM	Ketua Tim Kerja Informasi Veteriner	
11.00 – 11.30 (WITA)	Pelayanan Digitalisasi	Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis	
11.30 – 12.00 (WITA)	Diskusi		
12.00 – 12.30 (WITA)	Penutupan		

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN





